

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia, interaksi perdagangan antar-negara dan antar-kawasan meningkat dengan sangat pesat. Di sinilah konektivitas finansial menghubungkan lokal dengan global, serta memunculkan dinamika hubungan antara negara dan pasar. Dalam ranah politik, terkadang keuangan internasional dipandang sebagai sebuah hal yang netral (*sterile*). Dalam pandangan Balaam dan Veseth, hal ini disebabkan karena kita hanya melihat bayangannya dan lupa untuk mencermati pergerakan sumber daya yang sesungguhnya.<sup>1</sup> Olehnya, pergerakan sumber daya yang sesungguhnya akan bergantung pada kondisi tertentu, dimana pembangunan dalam segala bentuk skema keuangan bergantung pada kondisi ekonomi politik internasional yang terjadi. Tren liberalisasi sistem finansial dalam sebuah negara juga tidak luput dari tuntutan pasar. Sistem finansial internasional telah bergeser pada sistem finansial global, yang mana mekanisme aliran keuangan global tidak bergantung pada pusat regulasi oleh aktor nasional (negara) melainkan sebuah sistem yang dianut secara bersama pada tingkat global.<sup>2</sup>

Jepang juga merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari berbagai rangkaian penyesuaian (*adjustment*) terhadap sistem keuangan internasional. Selama ini peran Jepang dalam perekonomian internasional dan regional sangat signifikan. Bahkan Jepang sempat diprediksi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengimbangi Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an. Jepang menegaskan pada tahun 1980 untuk mengerahkan seluruh pihak di negara Jepang untuk secara semesta memahami kebijakan luar negeri dan peran besar

---

<sup>1</sup> David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1996), hlm. 149.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

Jepang dalam dunia internasional. Sebagaimana yang dituliskan oleh MOFA dalam *Blue Book* yang disusun pada tahun 1980-an bahwa, “*Foreign policy is not something to be done by the government or the foreign ministry alone. It should be backed by the correct understanding and strong support of each citizen. In other words, Japan's foreign policy in a broad sense requires tht each citizen deepen his understanding of world affairs through various activities and exchanges at home or abroad, and ask himself in earnest what are Japan's responsibilities and role in the world*”.<sup>3</sup> Di sinilah Jepang menjadi bagian dari perekonomian internasional yang tidak dapat menghindarkan diri dari skema pengaturan global sebagaimana yang ada dalam pandangan Balaam dan Veseth.

Pemerintah Jepang semula sangat ketat terhadap perdagangan dunia. Inilah yang membuat Jepang dengan mudah melakukan intervensi terhadap pasar melalui pendekatan struktural terhadap sistem bisnis dan perbankan. Meski dalam keadaan yang menutup diri ini, ekspansi ekonominya berjalan dengan sangat signifikan. Dari tahun 1990 hingga tahun 1993, Bank of Japan mengeluarkan suntikan modal kepada investasi asingnya hingga USD 27,8 triliun. Jumlah ini terhitung menggantikan Amerika Serikat sebagai penyumbang FDI terbesar di kawasan Asia Timur pada periode pasca Perang Dunia ke-2. Hal ini dapat diidentifikasi dari dominannya perkantoran, perhotelan, dan industri manufaktur oleh perusahaan Jepang di kota-kota besar di Asia. Disamping itu peningkatan produk konsumsi yang terdiri dari nama-nama produk Jepang seperti Sony, Panasonic, dan Canon sebagai konsekuensi atas proses produksi di negara yang bersangkutan di Asia Timur.<sup>4</sup> Bahkan mulai pada tahun 2004, peringkat kedua sebagai tempat tujuan FDI Jepang adalah Asia. Pada tahun 2004, Eropa tetap menjadi tujuan utama FDI dengan nilai investasi langsung mencapai hampir 140 miliar yen; Asia menempati urutan kedua dengan jumlah senilai diatas 100

---

<sup>3</sup> MOFA, “Basic Tasks of Japan’s Foreign Policy”, diakses dari situs <http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1980/1980-2.htm>, pada hari Minggu, 15 November 2009, pukul 02.50 WIB.

<sup>4</sup> Dominic Kelly, *Japan and the Reconstruction of East Asia*, (New York: Palgrave, 2002), hlm. 78-79.

miliar yen; sedangkan Amerika Serikat menempati posisi terakhir dengan jumlah kurang lebih 50 miliar yen.<sup>5</sup>

Berbagai rangkaian krisis ekonomi juga telah pernah dialami oleh Jepang. Hal ini terkait dengan interdependensi ekonomi Jepang dengan berbagai kawasan lain yang telah menempatkan diri dalam kerangka ekonomi liberal yang sangat rentan terhadap terjadinya krisis. Tingginya interdependensi terhadap negara yang rentan terhadap krisis menjadikan Jepang juga sangat rentan terhadap krisis. Mulai dari jatuhnya strategi ekonomi Jepang pasca-Perang Dunia ke-2 karena *oil boom* pada tahun 1973; krisis finansial Jepang 1990; Krisis Asia 1997 dan terakhir adalah krisis finansial global 2008.

Keajaiban ekonomi Jepang dinilai terhenti pada awal 1990. Akhir 1980-an, terjadi spekulasi berlebihan dari berbagai perusahaan Jepang, termasuk perbankan dan perusahaan jasa keuangan karena terjadi kenaikan harga tanah yang sangat besar disertai suku bunga yang dipatok dengan angka yang sangat rendah. Kebijakan suku bunga yang tidak tepat ini direspon dengan pembalikan suku bunga yang akhirnya menyebabkan krisis di pasar saham. Pada akhirnya krisis beranjak pada pembengkakan hutang publik dan terjadi kredit macet. Pemerintah Jepang bahkan harus memberikan suntikan dana kepada sektor perbankan. Pada akhirnya, keadaan ini memaksa Jepang untuk melakukan konsolidasi ekonominya kembali. Saat ini hanya terdapat empat bank nasional di Jepang. Artinya, sistem perubahan ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang dibangun dalam jaringan produksi Asia Tenggara harus bergulat untuk mencukupi kebutuhan finansialnya dengan cara apapun.<sup>6</sup> Pengalaman dari krisis-ke-krisis ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan dinamika pergantian sistem keuangan yang sangat kompleks.

---

<sup>5</sup> Ministry of Finance, *Foreign Direct Investment*, diakses dari situs <http://www.mof.go.jp/english/e1c008.htm>, pada bulan April 2009.

<sup>6</sup> Diakses dari situs [http://www.japan-101.com/history/history\\_lost\\_decade.htm](http://www.japan-101.com/history/history_lost_decade.htm), pada hari Kamis, 21 Januari 2009, pukul 14.39 WIB.

Semakin signifikannya peran ekonomi Jepang dalam kawasan menekan sekaligus mendorong Jepang untuk meliberalisasikan sistem keuangannya. Dengan sistem yang serba bebas, tentu intervensi pemerintah menjadi sangat terbatas. Liberalisasi finansial justru membawa Jepang pada krisis keuangan yang berkali-kali telah menghantam Jepang. Yang terakhir adalah krisis finansial global 2008 yang menjatuhkan Jepang dengan sangat telak karena keterkaitannya dengan perekonomian dunia. Jepang mengalami kontraksi ekonomi yang sangat mematikan hingga kuartal pertama tahun 2009. Beberapa penyebab diantaranya adalah berkurangnya daya beli masyarakat di negara lain karena terjadi peningkatan jumlah pengangguran di beberapa negara adidaya seperti Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara di kawasan Uni Eropa dan inflasi yang tidak dapat dikontrol. Kontraksi ekonomi Jepang dimulai dari penurunan indeks perdagangan secara drastis mulai pada kuartal ketiga 2006 yang kemudian semakin memburuk pada kuartal ketiga 2008.

Keterkaitan yang ternyata membuat perekonomian Jepang menjadi tidak aman (*economic insecurity*) pasca krisis ini menuntut Jepang membuka lembaran lama bersama kelompok negara ASEAN+3<sup>7</sup> yang salah satunya ditandai dengan peningkatan jumlah aliran dana pinjaman yang digelontorkan untuk kepentingan kawasan. Secara perlahan identitas Asia Timur-pun mendapatkan legitimasi secara ekonomi. Tercatat sejak krisis finansial 1997-1998, momentum berpihak pada pembentukan eksklusivitas Asia Timur, yang memberikan preferensi normatif terhadap Asia dari dan untuk masyarakat Asia, yang membedakan mereka dari Amerika Serikat dan Asia Pasifik.<sup>8</sup> ASEAN+3 yang kemudian melahirkan CMI (*Chiang Mai Initiative*) menjadi rezim keuangan yang berperan aktif dan akan menjadi studi kasus yang akan diangkat ke depannya.

---

<sup>7</sup> ASEAN yang terdiri dari 10 anggota (Indonesia, Myanmar, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Filipina); +3 (plus three) yang dimaksud di sini adalah Korea Selatan, Cina, dan Jepang sendiri.

<sup>8</sup> Deepak Nair, "Regionalism in the Asia Pacific/East Asia: A Frustrated Regionalism?", dalam *Contemporary South East Asia*, (Vol. 31, No. 1, 2008), hlm. 111-112.

CMI sebenarnya merupakan langkah reaktif yang terjadi atas krisis yang telah memukul telak pada krisis mata uang 1997. Dalam pertemuan yang dilakukan di Chiang Mai – Thailand, pada 6 Mei 2000, negara-negara ASEAN+3 sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam poin ketiga pernyataan bersama para menteri keuangan negara-negara ASEAN+3 (*Joint Statement of East Asia Cooperation*), dikatakan bahwa “..the areas of capital flows monitoring, self-help and support mechanism and international financial reforms”<sup>9</sup>, yang mana merupakan komitmen yang kuat atas perlunya membangun lembaga keuangan regional yang mandiri dan mendukung reformasi keuangan internasional yang masih berjalan.

CMI sebagai rezim keuangan regional dapat menjadi alternatif bagi negara-negara anggotanya untuk tetap bertahan dari gempuran krisis dengan mendapatkan pinjaman lunak untuk mengatasi krisis dalam jangka pendek. Di sinilah Jepang diduga memanfaatkan rezim ini untuk mengamankan perekonomiannya. Jepang merupakan negara yang sangat strategis dalam mengatur perekonomiannya. Campur tangan negara terhadap pasar dan bisnis menjadi corak yang sangat lazim dalam perekonomian Jepang. Sistem *administrative guidance* yang mengendalikan seluruh ekspansi bisnis Jepang masih diwariskan terhadap strategi atas segala bentuk sistem keuangan yang dianut oleh Jepang. Dalam sistem perekonomian Jepang, kerjasama antara MITI dan JFTC, misalnya, digagas untuk merumuskan beberapa hal terkait dengan daya saing industri dengan konstelasi bisnis yang terjadi dalam skala global.<sup>10</sup>

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Penyesuaian Jepang terhadap sistem ekonomi yang lebih terbuka menandakan bahwa terjadi perubahan orientasi kebijakan luar negeri ekonomi Jepang terhadap konstelasi internasional, regional, dan lokal yang ada. Dari sinilah

<sup>9</sup> Dokumen bertajuk “*The Joint Ministerial Statement of the ASEAN+3 Finance Minister Meeting*”, 6 Mei 2000, Chiang Mai, Thailand.

<sup>10</sup> Kazuyoshi Matsuura, et.al., “Institutional Resctructuring in the Japanese Economy Since 1985”, dalam *Journal of Economic Issues*, (Dec, 2003, 37), ABI/INFORM Global, hlm. 1011.

muncul dugaan bahwa skema Chiang Mai Initiative bagi Jepang merupakan pola baru dalam skema investasi korporasi yang dilakukan secara tidak langsung setelah proses liberalisasi modal dan finansial kawasan. Atas deskripsi yang telah secara singkat tergambar di atas, penelitian ini akan melihat pergeseran orientasi ekonomi Jepang yang masih di tengah berada dalam proses liberalisasi, kini tertuju pada Asia Timur melalui rezim Chiang Mai Initiative (CMI). Oleh karenanya permasalahan yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah ***Bagaimana Kepentingan Ekonomi Jepang Dalam Chiang Mai Initiative 2000-2009? Sejauh Mana Realisasi Kepentingan ini dapat tercapai?***

### **1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tentu ada beberapa maksud atas dilakukannya penelitian ini. Beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,:

- Menjelaskan keterkaitan perekonomian Jepang yang telah sedemikian eratnya terhadap dunia, baik internasional ataupun regional, sehingga dalam hal ini mempengaruhi preferensi kebijakan luar negeri Jepang khususnya di bidang keuangan (*financing policy*) di kawasan Asia Timur.
- Memahami perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang di bidang keuangan sebagai respon atas struktur internasional dan domestik, khususnya kecenderungan Jepang untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia Timur.
- Melihat kebijakan luar negeri Jepang dalam rangka mengamankan perekonomiannya, dalam partisipasi penguatan CMI.

### 1.3.2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan memberikan wawasan ekonomi politik internasional yang lebih segar dan baru. Pasalnya, sangat jarang ditemukan dalam referensi studi hubungan internasional yang mencermati ranah politik dalam proses perumusan kebijakan keuangan suatu negara. Beberapa studi yang ada hanya mencermati pada tataran perdagangan, investasi, dan hibah dana (ODA), namun tidak masuk pada ranah keuangan internasional. Pada umumnya, kebijakan keuangan suatu negara sendiri dicermati sebagai proses yang mengikuti mekanisme pasar. Namun di sini, perilaku yang ditunjukkan melalui studi kasus dalam penelitian ini disinyalir menunjukkan bahwa terjadi tarik-menarik yang cukup jelas antara afirmasi suatu negara terhadap sistem liberal, disamping tetap menempatkan negara sebagai aktor yang sentral dalam menentukan kebijakan keuangan yang independen. Oleh karenanya, penelitian ini juga akan melihat hubungan antara negara dan perubahan sistemik di tingkat internasional yang mengarah pada liberalisasi.

Penelitian ini juga ingin menegaskan kembali bahwa institusi regional (CMI) memiliki peran yang cukup penting bagi negara. Dengan institusi, negara dapat memanfaatkannya menjadi media untuk meningkatkan kapabilitas ekonominya. Hal ini juga disebabkan oleh ketangguhan pemerintah Jepang dalam memanfaatkan momentum yang ada.

Signifikansi praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan *awareness* bagi para pengambil kebijakan lokal (Indonesia) dan juga kawasan, agar memahami dan memanfaatkan sepenuhnya atas dibentuknya institusi Chiang Mai Initiative sebagai Jaring Pengaman Ekonomi dengan menjadikan cadangan devisa bersama ini sebagai upaya antisipatif (*precautionary measure*) di Asia Timur.

## 1.4. Kerangka Pemikiran

### 1.4.1. Kerangka Teori

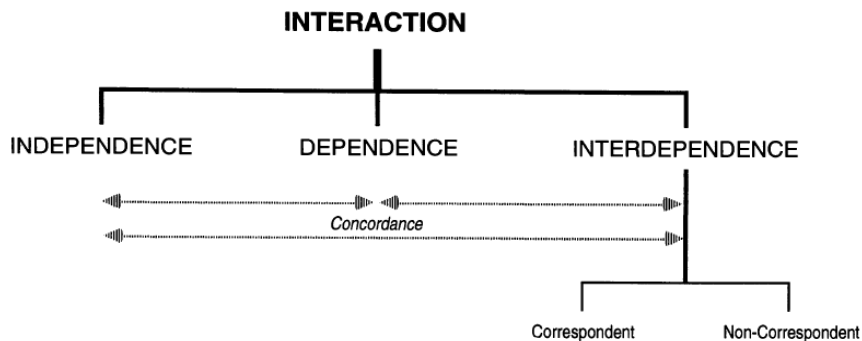
Penulis mencermati bahwa studi kasus yang diangkat tidak cukup hanya menggunakan sebuah pisau analisa (teori) untuk memahaminya. Penulis memetakan permasalahan dalam skripsi dalam bentuk pola hubungan yang terjadi diantara unit-unit yang ada. Dalam kerangka besarnya, tiga teori akan menjadi kombinasi yang melandasi penulisan penelitian ini ke depannya. Ketiga teori tersebut adalah mencakup dua lingkungan (*environment*) dalam level analisa, yakni internasional dan domestik. Penulis melihat, berdasarkan pemikiran Christopher Hill dalam mencermati perubahan politik kebijakan luar negeri, para penstudinya tidak cukup hanya mempertimbangkan satu level analisa saja. Diperlukan interaksi antar level analisa dalam mengembangkan suatu penelitian yang lebih valid. Dalam hal ini adalah level pada tingkat agen dan struktur (atau dalam praksisnya adalah domestik dan internasional).

#### a) Teori Interaksi Strategis

Jika ingin mencermati fenomena politik internasional, sesungguhnya kurang lengkap jika hanya menilik mengenai Interdependensi saja. Terkadang teori ini tidak cukup komprehensif dalam menerangkan fenomena yang ada. Oleh karenanya John Kroll mengembangkan teori interdependensi dalam konteks yang mencermati interaksi strategis. Teori Interaksi strategis ini mencakup beberapa pandangan yang digagas oleh para ilmuwan sebelumnya yang kemudian dirangkum dalam sebuah bagan interaksi, termasuk memperbaharui teori interdependensi yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye (1989).



**Gambar 1.1. Skema Interaksi Strategis**



Sumber: John A. Kroll, "Complexity of Interdependence", dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 37, No. 3, (1993), hlm. 325.

Dalam bagan diatas, pertama dijelaskan mengenai pengertian independensi yang dalam terminologi teori yang dikembangkan oleh Kroll dari Kelley dan Thibaut sebagai *Reflexive Control*. Dalam konteks ini, suatu pihak memiliki kebebasan dan independensi untuk mengontrol segala keuntungan yang ia peroleh tanpa memerdulikan apa yang akan atau telah dilakukan oleh lawannya (pihak lain). Dalam aspek kedua, yakni dependensi, atau disebut juga dengan *Fate Control*.<sup>11</sup> Dalam aspek ini, negara memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan dan diputuskan oleh lawannya (pihak lain) untuk memperoleh keuntungan lebih. Sedangkan aspek ketiga, sekaligus menjadi aspek yang akan disoroti dalam hal ini adalah interdependensi. Dalam lingkup ini suatu pihak akan bekerjasama dan saling berbagi dalam suatu tindakan bersama untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Semakin negara dapat mengkoordinasikan kebijakan dengan baik satu sama lain, maka akan lebih besar keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (*Behavioral Control*). Terminologi korespondensi dalam teori ini digunakan untuk mencermati tingkat interdependensi oleh masing-masing pihak. Dikatakan mencapai korespondensi positif, artinya hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalamnya bersifat sama. Namun apabila mencapai korespondensi negatif, berarti pihak-pihak di dalamnya tidak melakukan kerjasama dalam hal yang sama.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Apa yang dilakukan dalam sebuah kerangka tujuan bersama tidaklah dalam hal yang sama, sehingga bisa dikatakan sifatnya komplementer.<sup>12</sup>

Dalam analisis Kroll yang dikembangkan dari pemikiran Kelley dan Thibaut, interdependensi menjadi bagian dari proses interaksi strategis sebagaimana yang digambarkan di atas. Sedangkan komponen lain dalam proses interaksi ini adalah Independensi dan dependensi. Dari ketiga terminologi ini, dalam pandangan Kroll, ada empat hal yang harus digaris bawahi. Pertama, harus dipisahkan antara konsep *mutual dependence* dengan *interdependence*. *Mutual Dependence* menyangkut aspek kerentanan (*vulnerability*) dan berada dalam kondisi dimana masing-masing negara melakukan tindakan unilateralnya (yang berbeda satu sama lain) untuk memperoleh keuntungan (*payoff*) dari pihak yang lain. Sedangkan dalam terminologi interdependensi, dipahami dalam konteks sensitivitas, aktor-aktor yang terlibat didalamnya saling membagi kontrol (*the share of control*) untuk meraih sebuah tujuan yang sama diantara mereka.

Kedua, atas hal-hal yang tersebut diatas, terminologi interdependensi positif dan interdependensi negatif menjadi valid. Interdependensi positif terjadi ketika interaksi diantara pihak-pihak di dalamnya dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tersebut, sedangkan sebaliknya berlaku dalam interdependensi negatif. Namun dalam konteks untuk mencermati peran Jepang dalam Chiang Mai Initiative ini, terminologi interdependensi positif akan lebih tepat dalam memberikan penjelasan secara lebih lanjut.

Ketiga, merujuk pada Kelley dan Thibaut, John Kroll menjelaskan bahwa dalam mencermati fenomena interaksi semacam ini yang harus dilakukan adalah menelaah baik dari sisi interdependensi dan dependensi. Kemudian terakhir

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 329.

adalah, sekaligus yang terpenting adalah selalu ada unsur independensi dalam melihat dari sisi interdependensi ataupun dari kacamata dependensi.<sup>13</sup>

Dalam dalam konteks yang lebih kecil, Gordon Clark menjelaskan interdependensi dilihat dari keterkaitan struktur dan manajemen transaksi diantara perusahaan-perusahaan kecil yang tergabung dalam sebuah jejaring regional (atau global). Clark mengangkat konsep *Chain-of-Links* yang mana adalah jaringan transaksi antar-perusahaan yang kemudian menjadi dasar dari proses transaksi selanjutnya yang melibatkan lingkup pasar yang lebih spesifik lagi. Clark memberikan contoh Korporasi X yang membentangkan *Chain-of-Links* yang lingkungannya adalah bukan lagi nasional atau lokal, melainkan regional atau internasional.<sup>14</sup> Tindakan yang dilakukan oleh Korporasi X ini tidak lain adalah didasarkan pada respon pasar dan kesempatan produksi dengan biaya yang terendah. Oleh karenanya Clark menegaskan bahwa meningkatnya kecenderungan interdependensi antar-perusahaan secara global akan melampaui suatu identitas nasional, namun sekaligus meningkatkan pembangunan pada tingkat sub-regional. Disinilah secara spasial, lokasi perusahaan akan sangat menentukan. Dalam artian, perusahaan-perusahaan yang terangkum dalam *Chain-of-links* ini akan bergantung pada resiko keuangan (*risk finance*) yang mungkin terjadi dalam suatu negara nasional tempat ia berada. Namun dari sini, didapat bahwa aksesibilitas dana cadangan atas resiko keuangan yang dapat terjadi pada *Chain-of-Links* akan sangat mempengaruhi pertumbuhan interdependensi global. Disinilah teori ini akan digunakan untuk mencermati aktivitas ekonomi Jepang yang membangun *Chain-of-Links*-nya dengan berbagai jaringan perusahaan ekonomi yang ada di tingkat lokal di beberapa negara di Asia Timur.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 331.

<sup>14</sup> Gordon L. Clark, "Global Interdependence and Regional Development: Business Linkages and Corporate Governance in a World of Financial Risk", dalam *Transactions of the Institute of British Geographers*, new series, Vol. 18, no. 3, (1993), hlm. 309.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

## b) Teori Institusionalisme

Pada **tingkat internasional**, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Robert Keohane, yakni institusionalisme. Pada dasarnya dalam institusionalisme ini aspek kerjasama akan dilihat secara dominan sebagai suatu cara untuk menyalurkan kepentingan negara. Keohane melihat bahwa kepentingan negara dan kepentingan yang saling berbenturan antara satu (negara) dan lainnya eksis. Dalam kondisi negara-negara yang telah terikat dengan adanya *interdependensi*<sup>16</sup>, beberapa bentuk kerjasama sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal, namun kerjasama yang terlalu berlebihan juga tidak akan menjadi bermanfaat bagi negara.<sup>17</sup>

Keohane memang memiliki epistemologi liberal dalam mengembangkan teorinya. Namun demikian Keohane cukup skeptis dengan persoalan alamiah sebagaimana yang didikotomikan antara liberal dan realis. Ia mengatakan bahwa,:

My liberalism is more pessimistic about human nature and more cautious about causal connections running from economics to politics than some versions of classical liberalism and I have never been a supporter of the “Washington Consensus” in its strong neo-liberal form. Since attaching a “liberal label” to my perspective generates such a need for explication, it seems better to leave it off entirely. But in my view we should focus on individuals as the principal unit of analysis, as long as we keep in mind their interactions in society, and the historical and cultural contexts within which they live. This means that the analyst goes back and forth between individual and society, regarding both seriously, but always seeking to explain individual behavior, and aggregate it upward, rather than to theorize about society without considering whether the resulting propositions are consistent with patterns of individual behavior. In this way, we can give our theories micro-foundations and avoid the reification of abstract concepts or the positing of a collective consciousness for which there seems to be little scientific evidence.<sup>18</sup>

Meski Keohane melihat bahwa realisme adalah alat pertama dalam memahami politik dunia, namun pandangannya terhadap ranah ini sangat terbatas

<sup>16</sup> Dalam hal ini, interdependensi juga akan digunakan menjadi teori tersendiri untuk melengkapi penelitian ini.

<sup>17</sup> Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press, 1984), hlm. 11.

<sup>18</sup> Robert O. Keohane, “Introduction: from Interdependence and Institutions to Globalization and Governance”, dalam Robert O. Keohane, *Power and Governance in Partially Globalized World*, (London: Routledge, 2002), hlm. 3-5.

untuk kemudian membentuk sebuah doktrin yang komprehensif. Banyak yang tertinggal darinya, bukan hanya institusi, melainkan hubungan transnasional, politik domestik, dan peran ide. Realisme merupakan sebuah struktur yang panjang (rumit), namun mendekam pada proses yang pendek.<sup>19</sup>

Variasi pada kebijakan atau ketaatan anggota dalam suatu institusi dengan regulasi institusi akan dipandang secara parsial terhadap kadar kepentingan dan distribusi kekuatan diantara para anggota. Institusi dengan kesamaan nilai sosial dan sistem politik akan cenderung lebih kuat. Disamping itu kekuatan politik domestik cukup mempengaruhi setiap kebijakan di tingkat institusi.

Pada akhirnya, tidak ada satupun kedamaian (*peace*) ataupun kebijakan sosial dan ekonomi dapat di suarakan dalam prinsip-prinsip organisasi diluar pemerintah (*governments*). Dalam artian, institusi internasional perlu dikonstruksikan baik untuk memfasilitasi tujuan dimana pemerintah-pemerintah di dalamnya bersepakat dengan nilai-nilai umum yang mana merupakan hasil kesepakatan dari kepentingan-kepentingan pribadi suatu pemerintahan yang berkumpul. Institusi internasional memberikan informasi, fasilitator komunikasi, dan menghadirkan berbagai hal yang tak dapat dilakukan oleh pemerintahan nasional.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, studi ini mengarahkan pada institusi dan perannya untuk meningkatkan interaksi, dengan menekankan proses politik atas pembelajaran dan pendefinisian ulang kepentingan nasional, sebagaimana didukung dalam kerangka institusional.<sup>21</sup>

Kerjasama memerlukan aksi individu ataupun organisasi yang terpisah, tidak dalam kerangka harmoni, untuk dibawa kepada suatu konformitas yang satu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>20</sup> Robert O. Keohane, "International Liberalism Reconsidered", dalam *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>21</sup> Joseph S. Nye, Jr., *Power in a Global Transformation Age: From Realism to Globalization*, (London: Routledge, 2004), hlm. 24.

dengan yang lain melakukan proses negosiasi yang biasanya disebut dengan koordinasi kebijakan (*policy coordination*). Suatu rangkaian kebijakan dikoordinasikan ketika pengaturan internal (*self adjustment*) telah dilakukan diantara mereka, seperti resiko akan konsekuensi untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang lain terhadap pengurangan kapasitas pemenuhan kepentingan diri. Dengan kata lain, kerjasama antar-pemerintah terjadi ketika kebijakan yang diambil satu negara diketahui secara menyeluruh oleh negara lainnya sebagai upaya fasilitasi atas realisasi tujuan pribadi mereka, sebagai hasilnya adalah koordinasi kebijakan.<sup>22</sup>

Pandangan mengenai kerjasama ini akan dipadukan dalam pemikiran institusionalis Ikenberry dan Grieco yang mencermati pentingnya institusi sebagai media penyampaian kerjasama dalam bentuk koordinasi kebijakan ini. Dalam pandangannya terhadap fungsi dari Institusi, Grieco dan Ikenberry melihat terdapat empat rasional yang dapat disimpulkan dari fungsi suatu institusi. *Pertama* adalah kesepakatan institusional dapat menciptakan kesepakatan dalam perdagangan yang membuat gelombang keuntungan yang seimbang antara negara satu dengan lainnya. Kemudian rasional *kedua* adalah kesepakatan internasional dapat memfasilitasi pertukaran ekonomi dengan menciptakan mekanisme yang membolehkan negara untuk saling berbagi keuntungan dan kerugian atas keterbukaan yang berlebihan. Fungsi *ketiga* dari rumusan Grieco dan Ikenberry adalah penciptaan kesepakatan sebagai sebuah institusi dapat meningkatkan kapasitas suatu negara untuk mengatur perekonomiannya nasionalnya. Institusi internasional dapat mengumpulkan sumber daya (*resources*), seperti misalnya cadangan devisa, dan membuat dana cadangan untuk membantu pemerintahan nasional ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Sedangkan rasional *terakhir*, sekaligus juga sangat relevan dengan bahasan dalam penelitian ini adalah bahwa institusi internasional dapat memainkan peranan penting dalam mengikat atau menekan negara anggota lainnya. Negara yang kuat dapat mengatur kesepakatan

---

<sup>22</sup> Robert O. Keohane, "International Liberalism Reconsidered", *Op. Cit.*, hlm 51-52.

institusional sebagai langkah untuk mengunci negara yang lebih lemah kepada kondisi yang lebih dapat diprediksi dikemudian hari.<sup>23</sup>

### c) Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri

Pada **tingkat domestik**, penulis menggunakan teori perumusan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) yang dikembangkan oleh Christopher Hill.

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua aspek yang disebutkan dengan hubungan antara agen (*Agency*) dan struktur (*Structure*). Struktur dalam hal ini berkaitan dengan rangkaian faktor-faktor yang membentuk berbagai lingkungan dimana agen beroperasi, dan mereka pada dasarnya menentukan pilihan, dengan memberikan batasan-batasan terhadap segala yang mungkin, atau dengan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dan merumuskannya pada kehidupan yang sesungguhnya. Tidak benar jika aspek struktur ini dianggap sebagai sebuah kondisi eksternal (*external environment*) dari proses pembuatan kebijakan. Struktur dapat berada dalam lingkup keluarga hingga sistem internasional. Hill bersepakat dengan Hollis dan Smith bahwa aspek politik, birokratis, dan struktur sosial menjadi sangat vital dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>24</sup>

Sedangkan agen adalah suatu entitas yang memiliki kapabilitas atas keputusan dan langkah aksi dalam konteks tertentu. Agen dapat berupa individual ataupun kolektif yang didapat dikarakterisasikan secara sadar atau dengan pola perilaku tertentu. Terdapat perbedaan yang jelas dalam pemikiran Hill antara unit dan aktor. Unit adalah aspek-aspek yang ada dalam suatu sistem, misalnya adalah keuangan internasional, ekonomi internasional, atau periode waktu, termasuk

---

<sup>23</sup> Joseph M. Grieco and G. John Ikenberry, *State Power and World Markets: the International Political Economy*, (New York: W.W. Norton&Company, 2003), hlm. 291-292.

<sup>24</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, (New York: Palgrave MacMillan, 2003), hlm. 26.

negara. Namun aktor adalah terfokus pada entitas yang biasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>25</sup>

Dalam mencermati keterkaitan antara negara, kedaulatan, dan kebijakan luar negeri, Hill melihat bahwa kebijakan luar negeri eksis dalam ruang yang dibentuk oleh adanya eksistensi suatu negara dan kemampuannya yang terbatas untuk menjalankannya. Rasional dari kebijakan luar negeri ini adalah untuk memediasi dampak dari faktor eksternal terhadap domestik untuk mencari jalan cara yang lebih baik. Bukan juga menjadi dampak dari pengurangan kapasitas kedaulatan, namun sebaliknya menjadi sangat terkait dengan rangkaian kepentingan domestik yang sangat bervariasi satu dan yang lainnya. Justru dengan adanya kedaulatan inilah yang akhirnya menjadikan kebijakan luar negeri itu ada.

Dua titik ekstrim terdapat dalam aspek kebijakan luar negeri ini dimana kebijakan diambil dalam aspek dalam-keluar (*inside-out*) dan luar-kedalam (*outside-in*). Pada aspek *inside-out*, terdapat keadaan konstitusional suatu negara adalah primordial dan memiliki efek yang berbeda-beda terhadap hubungan internasional. Dalam hal ini negara dinilai sebagai suatu produk atas kontrak sosial. Sedangkan dalam konteks *outside-in* kebijakan justru terjadi atas besarnya pengaruh dari luar.<sup>26</sup>

Dalam pandangannya, terdapat tiga jawaban atas suatu kebijakan luar negeri. *Pertama* adalah dunia tidak terlalu aman sehingga tidak diantara organisasi internasional yang ada dapat dipercaya untuk menjamin survivabilitas fisik dan politik, dalam tataran tertentu “kita” seharusnya dapat melihat diri masing-masing untuk menentukan kebijakan yang lebih menjamin dalam rangka mencegah keadaan luar (*exogenous*) yang dapat merusak. *Kedua*, institusi internasional, perekonomian ataupun politik sangatlah luas dan kompleks. Tanpa kendaraan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 35.



untuk melaluinya, maka akan susah menyelaraskan kepentingan. Dalam hal ini, negara mencakup identitas, arah, dan agen dalam satu institusi. *Ketiga*, tanpa negara, masyarakat tertentu tidak akan mempunyai ruang khusus (*private space*) yang mana dapat berupa suatu kapasitas untuk mengatur perilaku sosial sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>27</sup> Pastinya, tanpa masyarakat domestik, maka tidak ada kebijakan luar negeri.

Studi mengenai kebijakan luar negeri dapat mengukur seberapa jauh kualitas demokrasi dari suatu negara. Kebijakan luar negeri dianggap menjadi representasi dari suatu masyarakat, mencerminkan seberapa jauh kebutuhan suatu masyarakat dipenuhi atau diperjuangkan dalam pengaruh kebijakan dari luar. Hill juga melihat bahwa negara dan bisnis, keduanya memiliki lingkungan eksternal yang mempengaruhi, meski perusahaan kerap kali tidak dalam suatu geografi yang sama. Keduanya memiliki kepentingan untuk bertahan dengan kemakmuran sendiri, dan hanya beberapa aktor saja yang dapat menentukannya. Aspek promosi kepentingan ekonomi nasional, sebagaimana didapat dari pemikiran Hill akan dikedepankan dalam penelitian ini. Kebijakan formal dalam hal ini diantaranya dilakukan dengan negosiasi perdagangan, promosi perdagangan, dan diplomasi keuangan.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam pandangan Yong Wook Lee yang mencermati kebijakan luar negeri Jepang dalam perspektif konstruktivis, Jepang dilihat menerapkan *state-led economy*.<sup>29</sup> Dalam kerangka bilateral, regional, ataupun global, sejak tahun 1980-an dinilai memiliki cara pandang alternatif dalam membangun ekonominya dengan melibatkan peran negara di dalamnya. Lee melihat Jepang akan dapat menghidupkan model ekonominya ketika aktor-aktor lain sungguh-sungguh telah masuk ke dalam arus liberalisasi. Dalam pemikirannya, Jepang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>28</sup> Robert Keohane, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>29</sup> Yong Wook Lee, *the Japanese Challenge to the American Neoliberal World Order: Identity, Meaning, and Foreign Policy*, (Stanford: Stanford University Press, 2008), hlm. 3.

dipandang membedakan dirinya dari berbagai konsepsi yang ada dalam berbagai model pembangunan ekonomi. Diantaranya adalah posisi Jepang di tengah Liberalisme, Marxisme, dan Developmentalisme. Karena kemampuan pemerintahnya untuk memimpin perekonomiannya, Lee melihat Jepang melakukan apa yang ia sebut dengan normalisasi. Bahwa semua kebijakan ekonomi didasarkan pada kemampuan pemerintah Jepang memimpin, bukan secara tegas diletakkan pada model pembangunan apapun.<sup>30</sup> Jepang juga memiliki kecenderungan untuk berlaku proteksionis dalam kebijakan ekonominya.

## 1.4.2. Studi Literatur

### a. Studi Mengenai Kerjasama Keuangan Asia Timur

Margareth Meutia dalam *Kepentingan Jepang dalam Kerjasama Keuangan Regional Asia Timur*, menjelaskan konteks penelitian yang hampir mirip seperti yang akan dilakukan oleh peneliti. Hanya saja dalam penelitian yang dilakukan oleh Meutia melihat keterkaitan Jepang terhadap sebuah interdependensi ekonomi yang mengarah kepada suatu krisis. Di sinilah Jepang dinilai perlu untuk mengambil langkah antisipatif dalam rangka mengamankan struktur perekonomiannya.

Apabila diletakkan dalam konteks sistemik, maka level analisa dalam penelitian ini terdapat pada level internasional. Beberapa pisau analisa (teori) yang digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini adalah teori interdependensi, *financial vulnerability*, dan teori mengenai kerjasama keuangan regional. Teori-teori ini dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan interdependensi antara Jepang dan negara-negara Asia Timur, serta mencari bagaimana krisis ekonomi telah mempengaruhi tatanan interdependensi yang telah ada. Di samping itu penelitian Meutia ini juga mencermati pembentukan kerjasama di kawasan Asia Timur.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Dalam mencermati kepentingan Jepang dalam kerjasama keuangan regional Asia Timur, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepentingan Jepang adalah pemberian kontribusi finansial terbesar, penempatan Jepang dalam posisi pemimpin, dan Jepang sebagai pemrakarsa bagi pembentukan mekanisme kerjasama.

Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa kerjasama keuangan sebenarnya telah sejak tahun 1970-an dilakukan. Sepertihalnya yang dijelaskan mengenai *ASEAN Swap Arrangements* yang dibentuk pada tahun 1977 yang mana dilakukan diantara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.<sup>31</sup>

Khusus mengenai keterlibatan Jepang dalam kerjasama keuangan regional Asia Timur ini, penjelasan diarahkan pada dominannya peran Jepang dalam rezim ini. Hal ini diidentifikasi dari besarnya jumlah dana yang berasal dari Jepang untuk Asia Timur. Disebutkan Jepang juga sebagai pemrakarsa pembentukan ASEAN+3 Research Group yang bertujuan untuk mengeksplorasi terhadap alternatif-alternatif baru bagi pembentukan kerjasama keuangan regional dan perwujudan stabilitas keuangan kawasan.<sup>32</sup> Di dalamnya juga disebutkan bahwa Jepang berkomitmen besar dengan besarnya jumlah sokongan dana yang diberikan terhadap kelompok penelitian ini.

Disamping itu pembentukan Asian Bond Market Initiative (ABMI) juga tidak luput dari peran penting Jepang dalam kawasan, khususnya melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation). JBIC dinilai memegang peranan penting karena beberapa saham unggulan dijamin oleh JBIC, menerbitkan saham yang bernilai mata uang lokal, menyediakan jaminan untuk perusahaan-

---

<sup>31</sup> Margareth Meutia, *Kepentingan Jepang Dalam Kerjasama Keuangan Regional Asia Timur Pasca Krisis Asia (1997-2005)*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 157.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

perusahaan yang berafiliasi dengan Jepang, serta menyediakan jaminan bagi *collateralized bond*.<sup>33</sup>

Dalam konteks noliberal institusionalisme, Jepang dinilai melibatkan diri dalam setiap proses kerjasama keuangan Asia timur. Pencapaian kepentingan ini dinilai dari keinginannya untuk terlibat dalam setiap proses kerjasama di Asia Timur, khususnya di bidang keuangan.

Dalam konteks interdependensi, Jepang dinilai sensitive karena krisis Asia 1997 dianggap menurunkan aktivitas ekonominya. Kemudian juga dibahas mengenai andil Jepang dalam menjadi pemrakarsa AMF. Pembentukan CMI sebagai pengganti AMF juga menjadi konsentrasi penuh Jepang yang dibuktikan dari besarnya jumlah cadangan dana yang diberikan Jepang untuk institusi keuangan ini. Dibahas juga mengenai rivalitas Jepang terhadap Cina yang memancing perlunya Jepang dalam memberikan andil di kawasan.<sup>34</sup>

Memang terdapat beberapa kesamaan dalam studi kasus penelitian yang diangkat oleh Margareth Meutia ini. Dalam konteks studi kasus, pembedanya hanyalah fokus penulis pada Chiang Mai Initiative sebagai institusionalisasi bagi bentuk kerjasama keuangan dalam bentuk yang lainnya. Sedangkan yang ditulis oleh Meutia berada pada aspek yang lebih luas, yakni kerjasama keuangan Asia Timur secara menyeluruh.

Aspek yang diangkat dalam kaitan perspektif untuk melihat persoalan ini sangat berbeda. Pertama, dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis, perspektifnya adalah Jepang sendiri bukan kawasan ataupun krisis ekonomi 1997 sendiri. Jika Meutia mengangkat persoalan berangkat dari Krisis Asia 1997, penulis mencermati terjadi perubahan cara pandang yang signifikan oleh Jepang sejak beberapa rangkaian krisis yang harus ditelisik sejak krisis energi pada tahun 1973, khususnya krisis yang melibatkan tekanan politik AS pada Plaza Accord

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 201.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

Agreement yang akhirnya mengacaukan sistem ekonomi dan keuangan yang selama ini telah digunakan oleh pemerintah Jepang. Ditinjau dari teori yang digunakanpun, sudah terlihat bahwa penelitian ini kedepannya akan mengedepankan interaksi antara dua level analisa yakni internasional dan nasional, berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Meutia yang hanya melihat dari sisi internasional.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kepentingan Jepang dalam kerjasama keuangan Asia Timur inipun dapat dibedakan dengan gamblang. Ketika Meutia hanya menempatkan aspek kontribusi finansial, kepemimpinan regional, dan pemrakarsa kerjasama sebagai indikator kepentingan, penulis melihat bahwa terdapat *missing link* yang sedikit melompat untuk melewati pertanyaan, apakah faktor-faktor diatas benar-benar dapat merepresentasikan kepentingan Jepang yang sesungguhnya? Apakah tidak mungkin, keterlibatan Jepang ini disebabkan oleh ukuran ekonomi (*economic size*) Jepang dalam kawasan yang mau tidak mau harus terlibat di dalamnya?

Disinilah penelitian ini kedepannya akan diletakkan. Permasalahan dalam penelitian ini akan menjawab, dari perspektif Jepang, bahwa memang struktur domestik dalam perumusan kebijakan luar negeri Jepang ini mengharuskan didorongnya penguatan kerjasama keuangan Asia Timur melalui Chiang Mai Initiative. Penelitian ini akan melihat bagaimana Jepanglah yang pada akhirnya membutuhkan pola baru dalam kebijakan ekonominya untuk bertahan dari segala bentuk guncangan. Ketergabungan dalam proses penguatan dalam kerjasama keuangan ini bukanlah suatu pilihan bagi Jepang. Melainkan merupakan usaha untuk menyelamatkan perekonomian Jepang setelah masuk ke dalam fase liberalisasi dalam sistem keuangannya.

## **b. Studi Kebijakan Luar Negeri Jepang**

Tulisan Yong Wook Lee sangat menarik untuk dicermati karena mencakup aspek kebijakan luar negeri Jepang. Dalam penelitian ini, disamping penulis

menggunakan landasan teoritik yang diungkapkan oleh Lee bahwa Jepang memiliki sebuah pandangan konstruktif yang kuat bahwa negara haruslah menjadi pemimpin dalam setiap langkah pembangunan negara itu, penulis sekaligus juga ingin mempertanyakan aspek yang lain dalam penelitian Lee ini.

Pada dasarnya, dalam konteks hubungannya dengan Amerika Serikat, aspek konstruktif sangat mendominasi dalam negara Jepang. Dikatakan oleh Lee, bahwa Jepang telah terkonstruksi suatu pandangan bahwa terdapat dikotomi antara Jepang dan Amerika Serikat yang telah lama terpendam dalam perspektif Jepang. Satu hal yang membuat tulisan ini menarik untuk diperbandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Lee menempatkan proses pembentukan AMF (*Asian Monetary Fund*) oleh Jepang adalah dalam kerangka persaingan dan pertentangan antara Jepang dan Amerika Serikat semata.

Dua pandangan yang dinilai penulis cenderung kontra-produktif adalah antara Jepang menempatkan diri bertentangan dengan Amerika Serikat<sup>35</sup>, dengan pandangannya bahwa Jepang mempromosikan *state-led economy* dalam setiap kebijakan perekonomiannya. Dalam pandangan penulis, pandangan pertama akan dapat berjalan tanpa mempertimbangkan aspek keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh oleh negara. Padahal dalam pandangan kaum institusionalis, prioritas dalam kebijakan ekonomi haruslah keuntungan material (*benefit*). Keuntungan ini akan dapat dicapai dengan maksimal ketika negara melakukan campur tangan terhadap pembangunan ekonominya serta tidak memerdulikan apakah akan bertentangan dengan Amerika Serikat ataupun tidak.

Penelitian Frances Rosenbluth, Jun Saito, dan Annalisa Zinn menunjukkan fakta yang berbeda jika pemikiran konstruktif Lee ini diaplikasikan dalam bidang keamanan. Dari survey yang dilakukan oleh Rosenbuth, Saito dan Zinn membuktikan bahwa pemerintah Jepang (dalam kepemimpinan LDP) akan bersikap kooperatif dalam mengaplikasikan kebijakan keamanan dengan Amerika

---

<sup>35</sup> Lee menggunakan paradigma berpikir konstruktivisme.

Serikat. Penelitian tersebut melihat, meski terdapat penolakan dari masyarakat, namun terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang setuju dengan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dari 18% menjadi 35% dalam kurun waktu 1995 hingga 2005.<sup>36</sup> Rosenbuth, Saito, dan Zinn mencermati terdapat politik LDP untuk mempengaruhi opini publik untuk mendukung kebijakan keamanan Amerika Serikat. Padahal Lee menekankan pada persepsi birokrat Jepang yang kala itu adalah berasal dari LDP.

Dalam konteks pandangan Lee terhadap proses pembentukan AMF, dikatakan bahwa analisis empirik menunjukkan bahwa terdapat suatu pandangan akan identitas yang tertanam secara kuat dalam setiap pengambil keputusan di Jepang yang dalam hal ini adalah MOF (*Ministry of Finance*), yang membedakan diri mereka dengan yang lain (*others*), dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Sepertihalnya pada perbedaan konsepsi mendasar dalam pembangunan ekonomi antara model Jepang dan Amerika Serikat. Lee berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pandangan sebuah unit terhadap keadaan dunia (persepsi). Karena dalam pandangannya, cara menentukan perilaku akan sangat bervariasi setiap unitnya, sesuai dengan interpretasi mereka terhadap keadaan yang ada. Lee juga mencermati apa yang selama ini “dibuat” oleh MOF, dan membuktikan konsep identitas yang telah sangat melekat dalam tubuh MOF (*Hypothesized Identity Conception*).<sup>37</sup> Melakukan pendekatan terhadap konsepsi identitas ini dalam kerangka sosial, MOF kemudian menentukan berbagai strategi kebijakannya.<sup>38</sup>

Sangat menarik untuk menarik garis pengetahuan dari hasil karya Lee ini karena jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kedepannya, sasaran dari penelitian Lee ini dapat dibedakan meskipun mencermati

---

<sup>36</sup> Frances Rosenbluth, Jun Saito, dan Annalisa Zinn, “America’s Policy Towards East Asia: How It Looks From Japan”, dalam *Asian Survey*, (Vol. 47, Issue 4, 2007), hlm. 585.

<sup>37</sup> Yong Wook Lee, *the Japanese Challenge to the American Neoliberal World Order: Identity, Meaning, and Foreign Policy*, (Stanford: Stanford University Press, 2008), hlm. 20.

<sup>38</sup> *Ibid.*

satu hal yang sama, yakni kerjasama keuangan dan kebijakan keuangan Jepang. Keterkaitannya juga cukup erat mengingat penelitian Lee yang menekankan pada AMF, suatu lembaga yang sebenarnya tidak pernah terwujud, namun dalam tataran ide dilanjutkan dengan pembentukan Chiang Mai Initiative (CMI).

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kedepannya akan menekankan pada pemikiran materialistik yang menggarisbawahi kepentingan ekonomi Jepang, atau keuntungan yang akan diambil oleh Jepang dalam kerangka kerjasama keuangan Asia Timur, Chiang Mai Initiative. Tentu hal ini berbeda dengan konsep identitas Jepang yang digagas oleh Lee. Justru berdasarkan sejarah kebijakan keuangan Jepang sejak puncak pertumbuhan industri Jepang pada tahun 1970-an, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa Jepang mengedepankan kepentingan materialisme untuk mengamankan perekonomiannya.

Meskipun demikian, penelitian ini ke depan akan mengambil salah satu pandangan mengenai politik luar negeri Lee yang melihat bahwa terdapat aspek *state-led economy* yang kuat dalam setiap kebijakan ekonomi Jepang yang diambil. Benarkah konstruksi pemikiran ini terjadi pada birokrasi Jepang? Ataukah ini berada pada unit tertentu dalam politik domestik Jepang? Penelitian ini kedepannya juga akan memberikan klarifikasi yang membuktikan apakah setiap kebijakan ekonomi Jepang diarahkan untuk memperkuat identitasnya yang bersinggungan dengan Amerika Serikat, ataukah Jepang akan lebih mementingkan kepentingan material daripada ide (*legitimacy*).

### **c. Studi Mengenai Interdependensi dan Hubungannya dengan Negara dan Industri**

Berbeda dengan teori mengenai *strategic interaction* sebagaimana yang digagas oleh John A. Kroll, Joseph Nye mencermati tidak adanya perbedaan antara *interdependence* dan *mutual dependence*. Untuk mengidentifikasi lebih jelas mengenai interdependensi, Nye membagi empat unsur pembeda dalam dimensi interdependensi. **Pertama** adalah sumber ketergantungan (*sources of*



*interdependence*). Sumber daya ketergantungan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni fisik dan sosial. Fisik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan individu (*endowment*) yang terbatas seperti hasil alam. Sedangkan sosial diartikan aspek-aspek dalam ketergantungan misalnya militer, ekonomi atau hal-hal yang sifatnya ide (perspektif).<sup>39</sup>

**Kedua** adalah faktor keuntungan dalam interdependensi. Dalam aspek keuntungan ini, Nye membagi menjadi tiga fenomena yang ia rangkum dalam terminologi keuntungan relatif (*relative gain*). Ketiganya adalah, *positive-sum game*, atau pihak-pihak di dalamnya akan mengalami keuntungan; kedua adalah *zero-sum game* yang mana ada salah satu pihak yang diuntungkan dan secara otomatis merugikan pihak yang lain. Ketiga adalah *negative-sum game* yang mana pihak-pihak yang terlibat akan bersama-sama mengalami kerugian.

**Ketiga**, adalah faktor biaya interdependensi (*cost of interdependence*). Ada dua aspek dalam pemikiran Nye, yang dalam hal ini juga digagas oleh Robert Keohane, dalam mencermati interdependensi. Pertama adalah sensitivitas. Sensitivitas merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar efek keterkaitan satu pihak dengan pihak lainnya. Sensitivitas memiliki dimensi waktu dalam jangka pendek (efek yang cepat). Kedua adalah aspek kerentanan (*vulnerability*). Dalam aspek ini, dicermati adanya biaya relatif yang dihasilkan atas perubahan struktur atau sistem interdependensi. jika dianalisa menggunakan biaya interdependensi ini, sebenarnya cukup untuk menggambarkan fenomena Jepang di Asia Timur.

**Keempat**, terdapatnya simetri interdependensi. Simetri dalam hal ini mencakup seberapa jauh keseimbangan dalam interdependensi. Apabila interdependensi suatu pihak simetris, maka keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dalam ketidakseimbangan, dependensi berlebih ataupun pihak yang kurang bergantung dapat saja memiliki keunggulan. Namun dalam hal ini, yang dicermati

---

<sup>39</sup> Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*, (New York: Longman, 1997), hlm. 162.

adalah manipulasi yang dilakukan dalam mengatur simetri interdependensi ini. Nye berpendapat, negara yang dapat mengatur tingkat interdependensinya-lah yang dianggap memiliki kekuatan (*power*) yang cukup kuat. Keadaan asimetris dinilai jantung dari politik internasional.

Dalam pandangannya mengenai interdependensi, apa yang disebut domestik dan internasional terkadang menjadi kabur. Ia mencermati bahwa terkadang, interdependensi sangat mempengaruhi politik domestik dalam cara yang berbeda-beda.<sup>40</sup> Sedangkan John Kroll melihat bahwa aspek dependensi tetap ada dan menjadi penentu dalam sebuah sistem interdependensi itu sendiri.

Sebagai teoretisi yang bekerja bersama dengan Nye, Keohane mencermati perlunya dibedakan dalam terminologi interdependensi dan globalisasi. Interdependensi adalah suatu keadaan kenyataan (*state of the world*), sedangkan globalisasi adalah suatu tren peningkatan aliran transnasional (*transnational flow*) dan merumitnya jaringan interdependensi. Mengingat kedua terminologi ini harus dapat diukur, maka globalisasi sendiri tidak digunakan dan muncul dalam pemikiran Nye dan Keohane mengenai globalisme.<sup>41</sup> Globalisme sendiri akan menjadi ganjil jika digunakan untuk mencermati hubungan-hubungan regional. Konsep ini dapat dibedakan dari lokalisasi, nasionalisasi, ataupun regionalisasi.<sup>42</sup> Dengan demikian konsep interdependensi memang masih menjadi bahasan yang relevan dalam tataran regional, sebagaimana penelitian ini kedepannya.

Beberapa tren yang muncul dalam membangun interdependensi ini dibangun dari hubungan negara dengan industri (*corporation*). Richard Rosecrance berpandangan bahwa tidak benar sebuah sistem ekonomi dan kemandirian negara akan berada pada puncak performanya ketika dikembangkan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>41</sup> Robert O. Keohane, "Introduction: from Interdependence and Institutions to Globalization and Governance", dalam Robert O. Keohane, ed., *Power and Governance in Partially Globalized World*, (London: Routledge, 2002), hlm. 15.

<sup>42</sup> Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr., "Governance in a globalizing world", dalam *Ibid.*, hlm. 194.

dengan memperkuat perekonomiannya (*home economy*). Pertama, negara memanfaatkan potensi jasa dan aliran saham dalam porsi GDP mereka, demikian juga negara lawan. Kedua, terhadap kondisi perang, negara kini tidak hanya melakukan peperangan konvensional. Terdapat kecenderungan untuk melakukan tindakan opresif dengan menarik seluruh aset perekonomian dalam suatu negara, bisa berupa faktor produksi, modal, ataupun pasar. Seperti China, dicontohkan oleh Rosecrance, akan sangat mudah dijatuhkan oleh lawannya ketika berbagai faktor produksi ditarik.<sup>43</sup>

Rosecrance membedakan bagaimana terminologi ekonomi dipandang dalam konteks negara dan konteks perusahaan (*firms*). Dalam konteks perusahaan, tentu akan menjadi lebih efisien jika melaksanakan seluruh sektor dengan perusahaan sendiri tanpa bekerjasama dengan pihak bisnis lainnya. Efisiensi menjadi kata kunci dalam kaca mata perusahaan.

Richard Rosecrance melihat kecenderungan ekonomi politik internasional yang berubah karena pada level negara, terjadi penyesuaian terhadap kecenderungan yang terjadi dalam praktek bisnis dalam korporasi. Ia pertamanya mencermati teori perusahaan (*the theory of firm*) bahwa efisiensi adalah tujuan utama dari suatu perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan memang idealnya menginginkan komponen pembangunan produksinya berada dalam satu lokasi sehingga memudahkan proses produksi. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya informasi dan teknologi, Rosecrance melihat bahwa praktik untuk spesialisasi dalam industri menjadi lebih nyata. Rosecrance mengutip ekonom Ronald Coase yang melihat bahwa untuk melakukan efisiensi, perusahaan melakukan *downsizing* dengan mengurangi produksi sub-komponen yang akan digunakan untuk proses produksi yang sesungguhnya, sehingga menghemat faktor produksi seperti tanah, perlengkapan, dan industri. Dari sinilah, industri menjadi sangat tergantung satu dengan lainnya.

---

<sup>43</sup> Richard Rosecrance, "International security and the virtual state: states and firms in world politics", dalam *Review of International Studies* (2002), 28, hlm. 443.

Untuk menekan biaya, negara dapat mencari *supplier* yang terpercaya, oleh karenanya perusahaan tidak lagi harus memproduksi seluruh komponen produksi di dalam negeri. Tren perusahaan virtual dicermati oleh Rosecrance bahwa kegiatan pusat perusahaan (penelitian dan pengembangan; desain; pembiayaan; pemasaran; asuransi dan transportasi) dapat dilakukan dalam negeri, namun kegiatan manufaktur tidak.<sup>44</sup>

Dari teori perusahaan ini kemudian Rosecrance melihat negara, yang dalam level yang lebih tinggi, mengubah pola kebijakan untuk mendukung perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara negara dan industri. Negara kemudian memiliki pemikiran yang sama dengan kaum industrialis. Di sinilah kemudian tren negara virtual (*virtual state*) melonjak. Beberapa negara seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, Belanda, Inggris, menerapkan sistem investasi pembangunan industri di tempat lain (negara lain). Efisiensi dengan upah buruh yang rendah, dan kedekatan dengan pasar menjadi pertimbangan utama dalam pemikiran Rosecrance.

#### **d. Studi Komparasi Institusi Keuangan: IMF**

Penting melihat proses kerjasama keuangan dalam IMF mengingat lembaga ini menjadi pembanding yang sangat imbang dibandingkan dengan CMI. Hanya saja keduanya dalam level yang berbeda. Namun IMF sedikit banyak juga menjadi penyebab dalam lahirnya kerjasama keuangan di Asia Timur.

Dalam proses pembentukannya ada dua peran penting IMF sebagaimana tertuang dalam statuta organisasi. Pertama adalah sebagai lembaga yang mewadahi kerjasama dalam menjaga stabilitas nilai tukar; kedua, memberikan bantuan likuiditas keuangan kepada negara yang neraca *balance of payments*-nya menunjukkan keterbatasan finansial untuk menstabilkan nilai tukar mata uang serta menjalankan roda perekonomian negara. Tentu saja IMF juga menerapkan pengawasan yang ketat terhadap negara yang memanfaatkan jasa peminjaman

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 447.

uang terhadapnya. Sedangkan peran tambahan IMF diantaranya adalah memberikan bantuan teknis (*technical assistance*) terhadap negara-negara anggota, mengadakan riset dan perumusan kebijakan terkait dengan persoalan finansial, serta menjadi forum dalam berbagai negosiasi keuangan internasional.

Dalam struktur organisasinya, IMF memiliki 24 direktur eksekutif yang merepresentasikan 184 negara-negara anggota, seorang direktur manajemen dan tiga deputy direktur. IMF juga memiliki badan pengawas internal yang disebut dengan IMFC (*International Monetary and Financial Committee*) yang terdiri dari sub-grup dari 24 kepala direktorat eksekutif dan rutin mengadakan evaluasi sebanyak dua kali dalam satu tahun. 24 direktur eksekutif ini merepresentasikan negara-negara anggota. Hanya saja negara dengan saham terbesar memiliki representasi tunggal (*one seat*) di dalamnya, mereka adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, China, Russia, Arab Saudi, dan Inggris. Sedangkan 16 kursi sisanya dibagi menjadi 176 negara yang menjadi pemegang saham minor.<sup>45</sup> Kepemimpinan diantara mereka ditentukan dalam periode dua tahun sekali. Dicermati juga dalam *Foreign Policy in Focus*, bahwa Sistem pengambilan keputusan melalui *voting* di World Bank dan IMF sebanyak lebih dari 40% dikuasai oleh lima negara raksasa utara (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang).<sup>46</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan, besar-kecilnya *quota* (modal) yang disetorkan oleh negara anggota sangat menentukan hak-hak yang dimiliki negara

---

<sup>45</sup> Peter Isard, *Globalization and the International Financial System: What's Wrong and What Can Be Done*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

<sup>46</sup> "International Financial Institutions", dalam *Foreign Policy In Focus: Interhemispheric Resources Center and Institute for Policy Studies*, (Vol. 1, No. 8), September 1996, hlm. 1, diakses dari situs <http://www.fpif.org/pdf/vol1/08ififi.pdf> pada hari Minggu, 10 Juni 2007, pukul 15.58 WIB; Sayangnya negara-negara raksasa inilah pihak yang setidaknya benar-benar memiliki kapasitas untuk bersaing secara internasional dalam segi perdagangan dan keuangan dalam mekanisme pasar. Sekitar 70% dari sumber ilmu pengetahuan keterampilan, permodalan, dan pengelolaan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, energi, transportasi, dan pemasaran dikuasai oleh negara Amerika Utara, Masyarakat Ekonomi Eropa (di bawah Jerman), serta Jepang (Juwono Soedarsono, 1995). Dalam hal ini, negara-negara berkembang menjadi tersingkir dalam segala proses negosiasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya.

dalam forum, distribusi *power (voting)*, dan akses terhadap likuiditas. Dalam konteks legal, penentuan banyaknya modal yang disuntikkan oleh negara anggota diukur berdasarkan GDP, cadangan devisa, volume perdagangan, dan besarnya ekspor. Namun demikian, hingga kini praktek penentuannya ada pada *negosiasi politis* para anggotanya.

Oleh karenanya dicontohkan secara gamblang oleh Keohane, kekuatan besar seperti Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar dalam institusi keuangan ini. Namun keputusan-keputusan yang muncul dari institusi berbeda dengan yang sesungguhnya diinginkan oleh Amerika Serikat secara unilateral. Walaupun memiliki pengaruh yang besar, namun segala keputusan yang dirancang haruslah disesuaikan dengan keadaan institusi dan keanggotaan di dalamnya. Hal ini diperlukan mengingat untuk dapat mengimplementasikan rumusan-rumusan dalam institusi, diperlukan kerjasama dari para negara anggota.<sup>47</sup>

Terkait dengan pemikiran mengenai kebijakan luar negeri, Keohane menambahkan bahwa politik domestik akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam institusi internasional. Oleh karenanya, distribusi kekuatan menjadi sangat penting. Dalam institusi dengan keanggotaan yang lebih sedikit, keputusan (termasuk mewakili kepentingan negara) akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan institusi yang memiliki keanggotaan yang luas, seperti misalnya Sidang Umum PBB.<sup>48</sup>

### 1.5 Skema Analisa

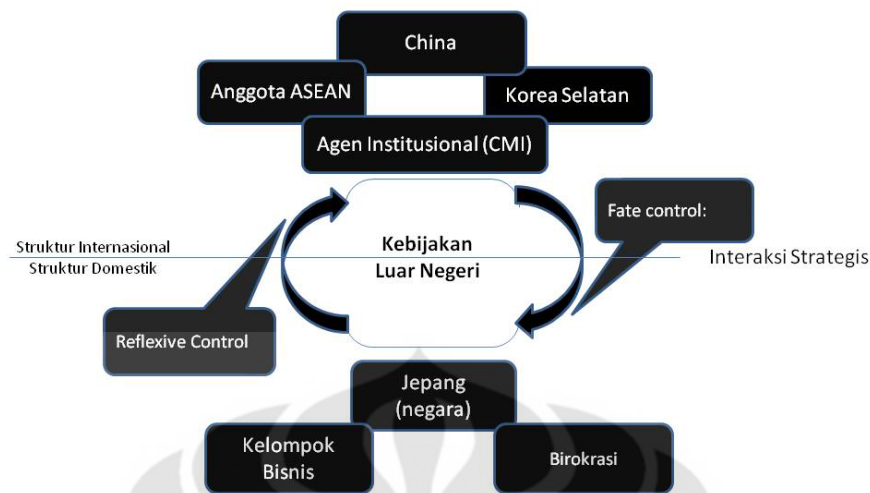
Berikut adalah skema analisa teori dalam kaitannya dengan penggunaannya untuk memberikan analisa deskripsi atas kasus yang diangkat.

---

<sup>47</sup> Robert O. Keohane, "International Institutions: Can Interdependence Work?", dalam Robert O. Keohane, ed., *Power and Governance in Partially Globalized World*, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

**Gambar 1.2. Level Analisa Kombinasi Teori**



Dalam **Gambar 1.2.**, level analisa atas kombinasi teori yang dirumuskan memiliki beberapa penjelasan, berikut diantaranya:

1. Terjadi interaksi antara struktur internasional dan struktur domestik.
2. Pada level internasional, kehadiran aktor negara akan dicermati dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi Jepang terhadap kawasan. Oleh karenanya dalam penelitian ini, kedepan, agen-agen negara akan dibagi kedalam negara secara individu dalam kawasan, dan negara tertentu di luar kawasan Asia Timur yang dalam hal ini memengaruhi proses perubahan kebijakan luar negeri Jepang. Sedangkan gambar para agen terhadap institusi saling bersinggungan karena terdapat ikatan diantara agen-agen tersebut, yakni negara ataupun isu-isu yang diangkat dalam sebuah kerjasama yang terinsitusalisasi ke dalam satu pihak atau aktor yakni institusi.
3. Pada bagian interaksi domestik dan internasional, dapat dijabarkan bahwa kebijakan luar negeri dirumuskan atas struktur internasional dan domestik.

Struktur internasional memberikan *input* pada apa saja terjadi dalam tataran internasional (regional), yang kesemuanya akan menyesuaikan kebutuhan dalam negeri pada struktur domestik untuk perumusan kebijakan luar negeri.

4. Oleh karenanya dalam tingkat domestik, tentunya akan banyak agen-agen yang akan memengaruhi kebijakan luar negeri Jepang. Tentu skema analisa ini diharapkan akan berkembang dan dapat mensintesis temuan yang lebih mendetail dan menjelaskan realita yang ada.

Penggunaan kerangka teori dan konsep dalam kerangka penelitian kualitatif ini tentu melingkupi tiga aspek dalam skema analisa yang akan dikembangkan dalam membangun pemikiran awal penelitian ini. Penulis melihat bahwa pada dasarnya Jepang memiliki keterikatan yang kuat (interdependensi) terhadap perekonomian regional. Krisis Asia yang juga menghantam perekonomian Jepang juga menjadi bukti akan kuatnya dampak krisis terhadap dependensi ekonomi Jepang terhadap kawasan ini. Kawasan ini (Asia Timur) sudah bukan lagi dianggap bagian dari territorial lain. Jepang memiliki persepsi bahwa kawasan ini telah menjadi bagian dari *home economy* baginya karena besarnya perekonomian Jepang yang dikembangkan di kawasan ini, terutama adalah melalui interaksi bisnis dan investasinya.

Kondisi inilah yang melatari perlunya Jepang mengambil tindakan untuk mengamankan perekonomiannya dari potensi krisis yang muncul di kawasan. Keadaan ini dipersepsikan membentuk struktur yang ditarik dari keadaan eksternal aktor (Negara: Jepang) dan juga *domestic environment* unit (Negara dan Masyarakat: Jepang). Struktur pembentuk kebijakan dari luar datang dari kemungkinan krisis dan beberapa krisis yang telah dilalui oleh Jepang. Sedangkan dari struktur domestik adalah dicermati dari penurunan kapasitas bisnis Jepang akibat krisis. Namun di sisi lain juga respon yang perlu diberikan atas tuntutan liberalisasi keuangan oleh para aktor ekonomi domestik.



Disamping ketiga teori yang dijelaskan diatas, tentu dalam proses berjalannya penelitian, kedepannya akan menemukan berbagai fenomena detail yang perlu diperdalam secara lebih lanjut. Di sinilah kerangka pemikiran dalam penelitian ini kedepan dapat berkembang sesuai dengan temuan data yang didapat.

## 1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pertama tentu penelitian ini memerlukan beberapa teori (perspektif) dalam memahami studi kasus yang diangkat. Oleh karenanya penelitian kuantitatif<sup>49</sup> dalam kasus ini hanya akan mendistorsi realita karena untuk menjelaskannya, diperlukan kombinasi teori dan perpektif. Jika mencermati dari kategorisasi yang dilakukan oleh Bruce L. Berg, maka penelitian ini termasuk dalam jenis studi kasus. Dalam penelitian studi kasus, secara lebih spesifik penelitian ini merupakan campuran antara pola intrinsik dan instrumental. Pola intrinsik mengisyaratkan identifikasi yang mendalam terhadap suatu permasalahan penelitian yang diangkat (studi kasus).<sup>50</sup> Persoalan yang diangkat, yakni intervensi ekonomi Jepang dalam pola CMI merupakan kasus yang unik dan patut diinvestigasi secara lebih lanjut. Senada dengan Berg, sebuah kasus yang unik akan sangat tepat diteliti dalam pola intrinsik.

Namun demikian, penelitian ini kedepannya tidak mengesampingkan perlunya memperdalam kasus melalui pola instrumental. Pola instrumental digunakan sebagai batu loncatan untuk menjelaskan fenomena yang ingin dicari. Dalam kaitannya dengan studi kasus yang akan diteliti secara intrinsik, perlu dilakukan telaah terhadap berbagai aspek dan aktivitas lain yang mendetail untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap suatu sasaran penelitian.<sup>51</sup> Dalam

---

<sup>49</sup> Dengan penggunaan satu teori besar untuk menjelaskan realita.

<sup>50</sup> Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, (Boston: Allyn and Bacon, 2001), hlm. 229.

<sup>51</sup> *Ibid.*

penelitian ini, untuk melihat kepentingan Jepang dalam CMI, harus terpetakan secara historis perjalanan kebijakan luar negeri Jepang dari kurun waktu tertentu sehingga pola kebijakan luar negeri yang sesungguhnya akan nampak dengan maksimal. Oleh karenanya kedua pola ini akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga tergolong dalam jenis penelitian studi kasus deskriptif (*descriptive case studies*). Berbeda dengan penelitian kualitatif pada umumnya yang menekankan pada *theory of action* dimana teori masih merupakan tanda tanya besar dalam penelitian<sup>52</sup>, penelitian ini memiliki ciri khas yang kuat dalam menggunakan teori yang akan digunakan untuk mengawal jalannya pembahasan.<sup>53</sup> Dalam keadaan seperti ini, maka penelitian ini tergolong dalam jenis studi kasus deskriptif. Unit-unit analisa juga telah terpetakan dengan jelas dalam sistem eksplanatif yang mengawali penelitian ini.

Metode dalam penelitian ini sebagian besar adalah menggunakan *content analysis* yang mana bersifat interpretatif. Dalam pengumpulan data, disamping studi literatur, akan dikumpulkan berbagai komponen data kuantitatif yang akan dianalisa secara kualitatif. Data lain didapat dari wawancara dan pengumpulan data primer lainnya yang akan dilakukan ke beberapa instansi terkait seperti Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Untuk data-data kuantitatif yang diperoleh, fokusnya akan ditetapkan pada data perdagangan, investasi, perbankan, dan neraca modal dan transaksi berjalan Jepang yang kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan berbagai pola yang ditemukan dalam studi literatur.

### **1.7. Asumsi**

- a) Penelitian ini mengasumsikan bahwa pemanfaatan CMI akan memberikan insentif positif terhadap keamanan perekonomian nasional Jepang.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

- b) Penelitian ini mengasumsikan dana CMI dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjamin likuiditas perekonomian nasional negara-negara anggotanya.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur penelitian dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya menjadi empat bab. Keempatnya adalah sebagai berikut,:

- **BAB I:** berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, studi literatur, skema analisa, metode, asumsi, dan sistematika penulisan.
- **BAB II:** Melihat interaksi ekonomi Jepang terhadap kawasan Asia Timur dan global yang mana menunjukkan pola perubahan dalam preferensi kebijakan keuangan yang diambil. Bab ini juga akan mencermati keadaan ekonomi domestik dan internasional yang disinyalir menjadi landasan setiap perubahan kebijakan keuangan Jepang.
- **BAB III:** Bab ini menjelaskan terinstitusionalisasikannya bentuk kerjasama keuangan regional Asia Timur, Chiang Mai Initiative, serta melihat proses penguatan peran Jepang dalam institusi ini dan peningkatan kapasitas kerjasama keuangan ini dalam kawasan.
- **BAB IV:** Menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini dengan menerangkan kepentingan Jepang dalam kawasan melalui Chiang Mai Initiative, hingga pada tahun 2009, yang sekaligus mencari benang merah antara penjelasan dari bab sebelumnya sehingga terangkai sebuah jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karenanya, bab ini memberikan analisis terhadap variabel-variabel yang akan diteliti.
- **BAB V:** Bagian kesimpulan yang menguraikan secara singkat mengenai permasalahan dan jawaban atas permasalahan untuk melihat apakah

hipotesa yang diajukan diawal penelitian terbukti atau tidak. Pada bagian ini juga terdapat rekomendasi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terkait dengan pola hubungan antar negara dan institusi, yang mana menjadi titik berat dalam mencari solusi perkembangan masalah perekonomian internasional belakangan.

